



**GAMBARAN KINERJA DESA TANGGUH BENCANA  
TANAH LONGSOR DI DESA TLOGOPAYUNG DAN DESA CENING  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Disusun oleh:  
Inda Sintya Prastika  
NIM 6411415067

**JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2019**

## ABSTRAK

Inda Sintya Prastika

Gambaran Kinerja Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor Di Desa Tlogopayung  
Dan Desa Cening Kabupaten Kendal Tahun 2019

Indonesia merupakan Negara rawan bencana. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana tanah longsor. Di Kabupaten Kendal, bencana tanah longsor sering terjadi di kawasan Kendal bagian atas. Penanggulangan bencana tanah longsor telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, salah satunya adalah penanggulangan bencana berbasis komunitas yaitu pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kinerja Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor di Desa Tlogopayung dan Desa Cening Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Terdapat 2 sampel dalam penelitian ini yang ditentukan dengan teknik *total sampling* yaitu Desa Tangguh Bencana Cening dan Desa Tangguh Bencana Tlogopayung..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor pencapaian Destana Tlogopayung adalah 2 aspek dalam kategori baik, 1 aspek dalam kategori cukup dan 3 aspek dalam kategori kurang. Sedangkan Destana Cening 3 aspek dalam kategori baik, 2 aspek dalam kategori cukup dan 1 aspek dalam kategori kurang sehingga Destana Tlogopayung termasuk dalam Destana Pratama dan Cening termasuk dalam Destana Madya.

Simpulan dari penelitian ini adalah kedua Destana masih perlu melakukan evaluasi dan perbaikan agar Destana dapat berfungsi secara optimal dalam penanggulangan Bencana.

**Kata Kunci : Kinerja, Destana, Tanah Longsor**

*Department of Public Health Sciences  
Faculty of Sport Science  
Semarang State University  
November 2019*

## **ABSTRACT**

Inda Sintya Prastika

Performance Overview of the Disaster Resilient Village Landslide in Tlogopayung Village and Cening Village Kendal Regency in 2019

Indonesia is a disaster-prone country. One of the disasters that often occur in Indonesia is a landslide disaster. In Kendal District, landslide disasters often occur in the upper Kendal region. Landslide disaster management has been carried out by the Kendal District Regional Disaster Management Agency, one of which is community-based disaster management, namely the formation of a Resilient Village / Kelurahan. The purpose of this study is to find out how the performance of the Desa Tangguh Landslide in the Tlogopayung Village and Cening Village Kendal Regency.

This type of research is descriptive with a quantitative approach. The instrument in this study used a questionnaire. There are 2 samples in this study that were determined by total sampling techniques, namely Desa Tangguh Cening and Desa Tangguh Bencana Tlogopayung.

The results showed that the Destana Tlogopayung achievement score was 2 aspects in the good category, 1 aspect in the adequate category and 3 aspects in the poor category. Whereas Destana Cening 3 aspects are in good category, 2 aspects in category are sufficient and 1 aspect in category is lacking so Destana Tlogopayung is included in Destana Pratama and Cening is included in Destana Madya.

The conclusion from this research is that Destana still needs to evaluate and improve so that Destana can function optimally in disaster management.

**Keywords: Performance, Destana, Landslides**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi yang berjudul “Gambaran Kinerja Desa Tangguh BencanaTanah Longsor Di Desa Tlogopayung Dan Desa Cening Kabupaten Kendal Tahun 2019” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, November 2019

Penulis



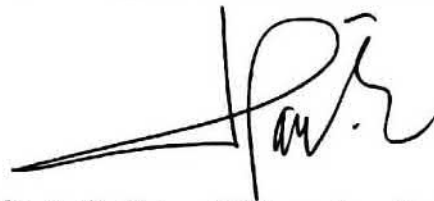
Inda Sintya Prastika



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Gambaran Kinerja Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor Di Desa Tlogopayung Dan Desa Cening Kabupaten Kendal Tahun 2019” diujikan di hadapan panitia ujian pada Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 18 November 2019



dr. Anik Setyo Wahyuningsih, M.Kes

NIP. 197409032006042001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Gambaran Kinerja Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor Di Desa Tlogopayung dan Desa Cening Kabupaten Kendal Tahun 2019” disusun oleh Inda Sintya Prastika, NIM 6411415067 telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, yang dilaksanakan pada,

hari, tanggal : Rabu, 11 Desember 2019

tempat : Ruang Ujian B IKM Unnes

Panitia Ujian:



Sekretaris,

Mardiana, S.KM., M.Si  
NIP.198004202005012003

Tanggal

Penguji I,

Dewan Penguji

Drs. Herry Koesyanto, M.S.  
NIP. 195801221986011001

6 Januari 2020

Penguji II,

Eram Tunggal Pawenang, S.KM.,M.Kes  
NIP. 197409282003121001

9/01-2020

Penguji III,

dr. Anik Setyo Wahyuningsih, M.Kes  
NIP. 197409032006042001

09/01-2020

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”.

(QS. At Taubah: 40)

### **PERSEMBAHAN:**

Karya ini ku persembahkan untuk:

1. Ayahnda Suwarno, dan Ibunda Setyo Asih
2. Adik- adikku Nanda dan Nadhia
3. Almamater Universitas Negeri Semarang

## **PRAKATA**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan berkat-Nya, sehingga tersusun skripsi yang berjudul “Gambaran Kinerja Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor Di Desa Tlogopayung dan Desa Cening Kabupaten Kendal Tahun 2019” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Semarang.

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi ini, dengan rendah hati disampaikan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Tandiyo Rahayu M.Pd., atas Surat Keputusan penetapan Dosen Pembimbing Skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Bapak Irwan Budiono, S.KM. M.Kes., atas persetujuan penelitian ini.
3. Penguji I, Bapak Drs. Herry Koesyanto, MS., atas saran dalam perbaikan Skripsi.
4. Penguji II, Bapak Bapak Eram Tunggal Pawenang, S.KM., M.Kes, atas saran dalam perbaikan Skripsi.
5. Penguji III, Ibu dr. anik Setyo Wahyuningsi, M.Kes., atas bimbingan dan saran dalam perbaikan Skripsi.



6. Seluruh anggota Desa Tangguh Bencana Tlogopayung, atas informasi terkait Desa Tangguh Bencana.
7. Seluruh anggota Desa Tangguh Bencana Cening, atas informasi terkait Desa Tangguh Bencana.
8. Ibunda Setyo Asih dan Ayahanda Suwarno, atas do'a, motivasi, semangat, kasih sayangnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Adik Nanda Nadhitya, Adik Nadhia Sabila dan Mas Tatag Pungkas, atas semangat, dukungan dan segala bantuan dalam proses pengambilan data.
10. Teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2015, atas kebersamaan, semangat, dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuannya dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 15 November 2019

Penyusun

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.2    RUMUSAN MASALAH .....	4
1.2.1    Rumusan Masalah Umum.....	4
1.2.2    Rumusan Masalah Khusus .....	4
1.3    TUJUAN PENELITIAN .....	5
1.3.1    Tujuan Umum.....	5
1.3.2    Tujuan Khusus.....	5
1.4    MANFAAT .....	6
1.4.1    Manfaat Bagi Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana .....	6
1.4.2    Manfaat Bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat .....	6
1.4.3    Manfaat Bagi Peneliti .....	6
1.5    KEASLIAN PENELITIAN .....	6
1.6    RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	10
1.6.1    Ruang Lingkup Tempat.....	10
1.6.2    Ruang Lingkup Waktu .....	10
1.6.3    Ruang Lingkup Keilmuan .....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1    LANDASAN TEORI .....	11
2.1.1    Bencana .....	11
2.1.2    Dampak Bencana.....	12

2.1.3 Penanggulangan Bencana.....	13
2.1.4 Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat .....	16
2.1.5 Kinerja Kelurahan Tangguh Bencana .....	23
2.2 KERANGKA TEORI .....	31
METODE PENELITIAN.....	32
3.1    KERANGKA KONSEP .....	32
3.2    VARIABEL PENELITIAN .....	32
3.3    JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN .....	33
3.4    DEFINISI OPERASIONAL.....	33
3.5    POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN .....	44
3.6    SUMBER DATA .....	45
3.7    INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA	45
3.7.1 Instrumen Penelitian .....	45
3.7.2 Teknik Pengambilan Data.....	46
3.8    PROSEDUR PENELITIAN.....	46
3.8.1 Tahap Pra Penelitian .....	46
3.8.2 Tahap Penelitian .....	47
3.8.3 Tahap Pasca Penelitian .....	47
3.9    TEKNIK ANALISIS DATA.....	47
HASIL PENELITIAN.....	49
4.1    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	49
4.2    HASIL PENELITIAN.....	51
4.2.1 Profil Responden .....	51
4.2.2 Kinerja Desa Tangguh Bencana .....	51
4.2.3 Legislasi .....	52
4.2.4 Perencanaan .....	52
4.2.5 Kelembagaan .....	53
4.2.6 Pendanaan .....	55
4.2.7 Pengembangan Kapasitas .....	56
4.2.8 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	58
4.2.9 Rekapitulasi Hasil.....	60
BAB V.....	62
PEMBAHASAN.....	62

5.1	LEGISLASI.....	62
5.2	PERENCANAAN .....	63
5.3	KELEMBAGAAN .....	65
5.4	PENDANAAN .....	68
5.5	PENGEMBANGAN KAPASITAS .....	70
5.6	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA .....	72
5.7	PENILAIAN PERBEDAAN KINERJA DESA TANGGUH BENCANA 73	
5.8	HAMBATAN.....	74
	PENUTUP.....	75
6.1	SIMPULAN.....	75
6.2	SARAN .....	76
	LAMPIRAN.....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	6
Tabel 2. 1 Perbedaan Kampung Siaga Bencana dan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana .....	22
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	33
Tabel 4. 1 Jumlah KK Dusun di Desa Cening .....	50
Tabel 4. 2 Penerapan Indikator Aspek Legislasi.....	52
Tabel 4. 3 Penerapan Indikator Aspek Perencanaan.....	53
Tabel 4. 4 Penerapan Indikator Aspek Kelembagaan.....	54
Tabel 4. 5 Penerapan Indikator Aspek Pendanaan.....	55
Tabel 4. 6 Penerapan Indikator Aspek Pengembangan Kapasitas.....	56
Tabel 4. 7 Penerapan Indikator Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	58
Tabel 4. 8 Penilaian Kinerja Desa Tangguh Bencana .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	31
Gambar 3. 1 Kerangka Konsep.....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penilaian Desa Tangguh Bencana .....	84
Lampiran 2. Ethical Clereance .....	94
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	95
Lampiran 4. SK Pembimbing.....	97
Lampiran 5 Contoh Laporan Kegiatan Destana Tlogopayung .....	98
Lampiran 6 Contoh SK Kebencanaan Destana Tlogopayung.....	100
Lampiran 7 Contoh SK Kebencanaan Destana Cening .....	116
Lampiran 8 Contoh Laporan Kegiatan Destana Cening .....	119
Lampiran 9 Contoh Dokumen Perencanaan Destana Cening .....	122
Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian.....	125

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Hal tersebut terjadi karena Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu Australia, Eurasia dan Pasifik dan juga Indonesia berada di gugusan gunung api (Adiyoso, 2018). Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terlihat bahwa kejadian bencana di Indonesia dari tahun 2005-2015 adalah 78% (11.648) merupakan bencana hidrometeorologi, dan 22% merupakan bencana geologi (BNPB, 2016). Kejadian bencana yang termasuk dalam kejadian bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, ekologi, degradasi lahan, puting beliung dan kekeringan (Hermon, Dedi, 2012).

Berdasarkan matriks kajian risiko bencana hidrometeorologi yang disusun oleh BNPB tahun 2015, dapat diketahui bahwa pada beberapa bencana, Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur terkait jumlah paparan risiko bencana. Sedangkan untuk jumlah kejadian bencananya, Jawa Tengah selalu menduduki peringkat pertama pada semua bencana selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 (DIBI, 2019).

Salah satu bencana yang sering terjadi di Jawa Tengah adalah bencana tanah longsor. Jumlah kejadian tanah longsor di Jawa Tengah merupakan kejadian tanah longsor tertinggi jika di dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 (DIBI, 2019). Jumlah kejadian tanah



longsor di Jawa Tengah selalu naik dari tahun 2015- 2017 lalu turun di tahun 2018 dan naik lagi pada tahun 2019 sampai dengan bulan April (DIBI, 2019). Di Fiji Thailand, tanah longsor diidentifikasi sebagai salah satu bahaya yang utama yang menyebabkan sekitar 25% kematian kumulatif tahunan (Drazba,dkk. 2017).

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang sering terjadi tanah longsor adalah di Kabupaten Kendal yaitu sebanyak 72 kali kejadian selama 5 tahun terakhir sampai dengan April 2019 (DIBI, 2019). Kabupaten Kendal merupakan kabupaten yang wilayahnya di bagi menjadi 3 yaitu wilayah dataran rendah, perbukitan dan juga pegunungan (Kendalkab. 2019). Kabupaten Kendal adalah kabupaten dengan risiko bencana tanah longsor dan banjir, namun menurut rekap data bencana BPBD Kabupaten Kendal angka kejadian tanah longsor lebih tinggi dari angka kejadian banjir di Kabupaten Kendal. Kejadian bencana pada tahun 2015 di Kabupaten Kendal adalah 5 kali banjir dan 7 kali tanah longsor. Pada tahun 2016 terjadi 9 kali banjir dan 12 kali tanah longsor. Pada tahun 2017 terjadi 12 kali banjir dan 19 kali tanah longsor. Pada tahun 2018 telah terjadi 9 kali banjir dan 17 kali tanah longsor (BPBD, 2019).

Perubahan iklim yang terjadi baru- baru ini juga mempengaruhi terjadinya kejadian bencana. Seiring banyaknya bencana yang terjadi, maka dapat memberikan dampak buruk pada sektor ekonomi dan lingkungan baik dampak langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu maka pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana dan risikonya perlu ditingkatkan (Adiyoso, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan di India, tanah longsor adalah salah satu bencana yang dipicu oleh curah hujan yang tinggi yang menyebabkan

kerugian berupa kerusakan properti sampai dengan hilangnya nyawa (Bhardwaj,dkk. 2019)

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sedangkan menurut PP Nomor 21 Tahun 2008, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 tahap yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat dan tahap pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di tingkat nasional dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota tentu saja dengan bantuan masyarakat dan pihak swasta.

Salah satu upaya yang dilakukan BNPB dan BPBD adalah melalui pembentukan Kelurahan/Desa Siaga Bencana dan Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana di desa dan kelurahan dengan risiko bencana tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 terkait fungsi dan tugas BPBD dan BNPB sebagai badan penyelenggara penanggulangan bencana daerah dan nasional. Dalam upaya tersebut mengandalkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana. Di Uganda, risiko tanah longsor sangat tinggi terjadi, untuk itu Uganda juga menerapkan kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yaitu dengan penanaman pohon sebagai pemanfaatan lahan (Martens, dkk. 2018).

Di Kabupaten Kendal, terdapat 3 Desa Tangguh Bencana dengan 2 desa risiko bencana tanah longsor dan 1 desa lainnya dengan risiko bencana banjir. Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal adalah Desa Cening Kecamatan

Singorojo sebagai Desa Tangguh Bencana tanah longsor, Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan sebagai Desa Tangguh Bencana tanah longsor dan yang ketiga adalah Desa Kebondalem Kecamatan Kendal (BPBD, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan perbandingan antara kinerja Desa Tangguh Bencana di Desa Cening dan Desa Tlogopayung yang merupakan Desa Tangguh Bencana tanah longsor.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Umum**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana gambaran kinerja Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019 ?”

### **1.2.2 Rumusan Masalah Khusus**

1. Bagaimana gambaran legislasi Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019?
2. Bagaimana gambaran perencanaan Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019?
3. Bagaimana gambaran kelembagaan Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019?
4. Bagaimana gambaran pendanaan Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019?
5. Bagaimana gambaran pengembangan kapasitas Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019?

6. Bagaimana gambaran penyelenggaraan penanggulangan bencana Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran kinerja Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui gambaran legislasi Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019.
2. Mengetahui gambaran perencanaan Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019.
3. Mengetahui gambaran kelembagaan Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019.
4. Mengetahui gambaran pendanaan Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019.
5. Mengetahui gambaran pengembangan kapasitas Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019.
6. Mengetahui gambaran penyelenggaraan penanggulangan bencana Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019.

## 1.4 MANFAAT

### 1.4.1 Manfaat Bagi Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Dapat memberikan informasi terkait Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana tanah longsor yang ada di Kabupaten Kendal serta menjadi bahan masukan untuk peningkatan kualitas Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal.

### 1.4.2 Manfaat Bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pustaka atau referensi, sehingga dapat digunakan sebagai referensi akademik tentang Desa Tangguh Bencana.

### 1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Merupakan media belajar untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, khususnya mengenai Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal.

## 1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Rancangan Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ika Ayu Setyoning sih	Peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Di Desa Tangguh Bencana (Destana) Gemawang Kecamatan	Deskriptif Kualitatif	Peran FPRB, kesiapsiagaan masyarakat	FBRP Mengajarkan dan memberikan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat. Kesiapsiagaan masyarakat sebesar 81,94% (sangat siap)

---

2	Deski Irandi	Jambu Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta	Kualitatif	Program Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program KBBM	Program yang difokuskan di Kelurahan Prenggan yaitu Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (CBFA) dan manajemen pengelolaan sampah sedangkan di Kelurahan Bener yaitu Pertolongan Pertama. Faktor penghambat secara internal yaitu <i>cash request</i> yang diajukan hanya sebagian yang di <i>acc</i> dan sebagian dipending; Faktor penghambat secara eksternal yaitu adanya birokrasi- birokrasi pemerintahan
---	-----------------	---	------------	---	---

					yang sangat panjang Sedangkan untuk faktor pendukungnya adalah adanya dana PMI untuk kegiatan KBBM, dan adanya dukungan dari pemerintah kota.
3	Zahirah Zahrah	Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	Deskriptif Kualitatif	Kebijakan dalam Kelurahan Siaga Bencana dan Kendala dalam pelaksanaan Kelurahan Siaga Bencana.	Ketepatan kebijakan yang di terapkan dalam Kelurahan Siaga Bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sudah dapat dikatakan tepat meskipun sepenuhnya menjadi kunci untuk mentuntaskan risiko bencana. Untuk kendala dalam pelaksanaan KSB yang dihadapi adalah

					kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam pengendalian bencana, kurangnya minat partisipasi remaja dan juga kurangnya Fasilitas KSB
4	David Irawan dan Ari Subowo	Peran Kelurahan Siaga Bencana Guna Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang	Deskriptif Kualitatif	Peran Kelurahan Siaga Bencana	KSB kurang berperan aktif karena adanya perbedaan pengertian antara BPBD dan masyarakat, dimana seharusnya KSB adalah kelompok relawan namun masyarakat menginginkan gaji dari KSB

Dari keaslian penelitian diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah variabel yang diteliti, tempat penelitian, dan waktu penelitian.



## **1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN**

### **1.6.1 Ruang Lingkup Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cening Kecamatan Singorojo dan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

### **1.6.2 Ruang Lingkup Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus- September 2019.

### **1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup keilmuan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah ruang lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat Kesehatan dan Keselamatan Kerja terutama terkait Manajemen Bencana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Bencana**

Bencana adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun faktor non alam yang dapat mengakibatkan kerugian berupa kehilangan nyawa, kerugian ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya di suatu wilayah tertentu (Adiyoso, 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, jenis bencana di bedakan menjadi 3, yaitu :

- 1) Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 2) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam misalnya berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan epidemi.
- 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror

Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan,

ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, 2018). Menurut BNPB pada Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana (2018) bencana tanah longsor seringnya dipicu oleh curah hujan yang tinggi, tanah terjal, kurangnya kepadatan tanah, kurangnya tutupan vegetasi serta getaran. Bencana tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan keterbatasan waktu untuk melakukan evakuasi.

### **2.1.2 Dampak Bencana**

Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, kejadian bencana tidak mudah di prediksi. Sifat bencana yang tidak pasti dapat menimbulkan kemungkinan kerugian yang lebih besar. Akibat bencana yang terjadi merupakan komponen- komponen yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan manusia (Adiyoso, 2018).

Menurut Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, akibat bencana adalah kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan meningkatnya risiko bencana atau menurunnya kapasitas individu masyarakat. Sedangkan dampak yang terjadi akibat bencana adalah berupa dampak ekonomi dan fiskal, dampak sosial budaya dan politik, dampak pembangunan manusia serta dampak lingkungan.

Di Austria tepatnya di Felbertauern, terjadi longsor pada tahun 2013 dan menyebabkan putusnya akses jalan dan gangguan lalu lintas, sehingga selanjutnya hal ini dapat mempengaruhi perekonomian regional di wilayah tersebut (Pfurtscheller & Genovese, 2019). Pada penelitian lain yang dilakukan oleh

Alimohammadlou (2012) di jelaskan bahwa tanah longsor memberikan dampak terhadap lingkungan seperti perubahan morfologis, modifikasi aliran, dan hilangnya fauna asli serta hilangnya flora adalah bagian dari proses alami. Tak hanya itu, dampak terbesar tanah longsor adalah dampak social dan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat.

### **2.1.3 Penanggulangan Bencana**

Mengingat begitu banyak dampak dan akibat bencana, maka perlu dilaksanakan penanggulangan bencana. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta , mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penanggulangan bencana menurut UU No.24 Tahun 2007 dibagi menjadi 3 yaitu:

#### **1. Pra bencana**

Situasi saat tidak terjadi bencana, dalam situasi ini hal yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah perencanaan, penanggulangan risiko,

pencegahan, pelaksanaan pembangunan, analisis risiko, diklat dan standar teknis pelaksanaan penanggulangan bencana.

Situasi terdapat potensi terjadinya bencana, dalam hal ini kegiatan penyelenggaraan bencana dibagi menjadi 3 yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan bencana dilaksanakan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan meliputi penyusunan dan uji coba penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan barang pemenuhan kebutuhan, persiapan evakuasi dll. Sistem peringatan dini dilaksanakan melalui pengamatan gejala bencana, analisis gejala bencana sampai dengan pengambilan keputusan dan tindakan. Dan yang terakhir adalah mitigasi bencana yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana berupa penataan ruang, pengaturan bangunan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

## 2. Saat bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat adalah pengkajian lokasi, kerusakan dan sumber daya lalu penentuan status bencana, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan sampai dengan pemulihan segera sarana prasarana vital.

## 3. Pasca bencana

Penyelenggaraan pasca bencana dilakukan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yang dilakukan adalah berupa perbaikan lingkungan, sarana prasarana, pemberian bantuan sampai dengan pemulihan sosial ekonomi, keamanan, dan juga fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekonstruksi dilakukan dengan kegiatan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana, pembangunan sarana social, pembangkitan kembali kehidupan social, penerapan rancang bangun yang tepat, dan peningkatan kondisi serta fungsi dalam segala tatanan masyarakat.

Pada bencana tanah longsor, penanggulangan bencana yang dapat dilakukan menurut BNPB pada Buku Saku Tanggap, Tangkas, Tangguh Menghadapi Bencana adalah sebagai berikut:

#### 1. Pra bencana

Mengurangi tingkat keterjalalan lereng permukaan maupun air tanah. (Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng ke luar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah); Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling; Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya; Terasering dengan sistem drainase yang tepat (drainase pada teras - teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah); Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80% sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diseling-selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput); Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat; Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Pengenalan daerah rawan longsor; Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhuan batuan (rock fall); Penutupan rekahan di atas lereng

untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah; Pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction (infeksi cairan); Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel; Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan. Menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra dan sebagainya; Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil (tanah gerak); Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan; Waspada ketika curah hujan tinggi; Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan (BNPB, 2017)

## 2. Saat Bencana

Segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsor; Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan.

## 3. Pasca bencana

Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil; Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.

### **2.1.4 Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat**

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan masyarakat terkait kebencanaan yang dilaksanakan secara terorganisir. Mereka menggunakan sumber daya nya sendiri untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana (IDEP, 2007). Penanggulangan bencana berbasis masyarakat juga dilaksanakan pada sebelum terjadi bencana atau pra bencana salah satunya pada bencana tanah longsor.

Menurut yayasan IDEP dalam buku panduan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, yang perlu dilakukan masyarakat sebelum terjadi bencana tanah longsor adalah sebagai berikut:

1. Tidak menebang atau merusak hutan
2. Melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan berakar kuat, seperti nimba, bambu, akar wangi, lamtoro, dsb., pada lereng-lereng yang gundul
3. Membuat saluran air hujan
4. Membangun dinding penahan di lereng-lereng yang terjal
5. Memeriksa keadaan tanah secara berkala
6. Mengukur tingkat kekerasan hujan

#### 2.1.4.1 Lembaga Penyelenggara Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Seperti yang kita ketahui, ada beberapa istilah organisasi yang merupakan organisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat atau komunitas. Ada yang disebut dengan Kampung Siaga Bencana, Kelurahan/Desa Siaga Bencana dan juga Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. Perbedaan dari ketiganya adalah pada lembaga penyelenggaranya, dimana Kampung Siaga Bencana diselenggarakan oleh Kementrian Sosial RI sedangkan Desa/ Kelurahan Siaga Bencana dan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BNPB dan BPDB. Perbedaan dari Desa/ Kelurahan Siaga Bencana dan Desa/ Kelurahan Tangguh bencana adalah komponen organisasi yang ada di dalamnya. Desa/ Kelurahan Siaga Bencana terdiri dari tim relawan saja sedangkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana terdiri dari tim relawan dan FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) dan di lengkapi dengan fasilitator (Habibullah, 2013)



Pada tahap pra bencana yaitu pada situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana, pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan kampung siaga bencana oleh Kementerian Sosial RI dan desa/tangguh bencana oleh BNPB merupakan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana dan secara kelembagaan baik teknis maupun administratif dapat dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI maupun BNPB. Namun tetap dikoordinasikan oleh BNPB.

Secara kelembagaan Kementerian Sosial RI diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Uraian mengenai kelembagaan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Kementerian Sosial RI dipimpin oleh Menteri Sosial dan bertanggung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan BNPB dipimpin oleh seorang Kepala BNPB dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

#### 2. Tugas

Kementerian Sosial RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang sosial dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan di bidang sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta

penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia Kementerian Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan pemulihan serta penguatan sosial bagi korban bencana alam. Dengan demikian upaya penanggulangan bencana oleh Kementerian Sosial RI sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana.

Perlindungan sosial itu sendiri diartikan sebagai upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial dan pembuatan kebijakan kampung siaga bencana oleh Kemensos adalah pelaksanaan tugas untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial yang disebabkan oleh bencana alam.

Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Tugas dari BNPB adalah

- 1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara,
- 2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- 4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

- 5) Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
  - 6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - 8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Fungsi

Kementerian Sosial RI mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial,
- 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial,
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial,
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah,
- 5) Melaksanakan kegiatan teknis yang berskala nasional. Jika dikaitkan dengan kebijakan kampung siaga bencana maka kampung siaga bencana sebagai upaya menjalankan fungsi Kementerian Sosial RI sebagai perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Sedangkan BNPB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.

- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Jika dilihat dari fungsi BNPB maka terlihat jelas pembuatan kebijakan desa/kelurahan tangguh bencana sebagai pelaksanaan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan bukan sebagai pelaksana kegiatan.

#### 2.1.4.2 Perbedaan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/kelurahan Tangguh Bencana disebutkan pengertian Desa/Kelurahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota. Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-

dampak bencana yang merugikan. Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana tidak disebutkan definisi kampung. Langsung didefinisikan kampung siaga bencana sebagai wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. Kedudukan kampung siaga bencana berada di kecamatan/kelurahan/desa/dusun.

Tabel 2. 1 Perbedaan Kampung Siaga Bencana dan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Variabel	Kampung Siaga Bencana	Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
Konsep Desa/ Kelurahan dan Kampung	Kampung hanya sebatas merek dan mengacu pada kelembagaan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat yang bisa berkedudukan di kecamatan/desa/kelurahan/dusun.	konsep yang jelas yaitu mengacu pada definisi desa sebagai wilayah administratif
Maksud dan Tujuan	Upaya penanggulangan bencana berbasis komunitas, tujuan memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya	Upaya penanggulangan bencana berbasis komunitas, tujuan cenderung sebagai upaya peningkatan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Organisasi Pelaksana	Membentuk organisasi pelaksana/kelembagaan baru yang dinamakan “Kampung Siaga Bencana”	Dapat membentuk kelembagaan baru atau memanfaatkan dan mengembangkan kelembagaan yang sudah ada
Pelaksana	Perseorangan yaitu relawan (Tagana) dan unsur masyarakat	Perwakilan kelompok siaga bencana atau perseorangan (relawan penanggulangan

Mitra Masyarakat dan Mitra Organisasi	Lebih cenderung pemerintah sebagai mitra organisasi	bencana berbasis masyarakat) Mengutamakan kemitraan dan kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama.
Konteks Ecological	Disebutkan pada ketentuan umum tanpa diatur lebih lanjut yaitu definisi kearifan lokal	Salah satu prinsip desa/kelurahan tangguh bencana yaitu mobilisasi sumber daya lokal
Protokol Intervensidan Deliveri Layanan-Layanan	Terkesan intervensi pemerintah lebih dominan dibanding komunitas lokal itu sendiri mulai dari fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penyiapan sistem peringatan dini lokal, pembuatan lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal, simulasi (gladi bencana) dan apel lokal siaga bencana	Cenderung memberi pedoman langkah-langkah kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah
Populasi Target	Masyarakat yang potensial terkena ancaman dan resiko bencana alam baik pada tingkat kecamatan/desa/kelurahan maupun dusun	Masyarakat yang potensial terkena ancaman dan resiko bencana alam baik pada tingkat desa/kelurahan

---

Sumber : Habibullah (2013)

## 2.1.5 Kinerja Kelurahan Tangguh Bencana

### 2.1.5.1 Kinerja

Menurut Moehariono (2012) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis pada suatu organisasi.

Sedangkan dalam sumber lain, Prawirosentono (1999) dalam Sutrisno (2010), mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

#### 2.1.5.2 Kinerja Kelurahan Tangguh Bencana

Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Secara garis besar, desa/kelurahan tangguh bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi

Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan). Dalam pelaksanaannya, perencanaan kegiatan cukup penting keberadaannya, untuk itu dokumen perencanaan menurut Ariyani, dkk, (2016) harus disusun secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilaksanakan oleh Saroji, dkk (2016) dokumen perencanaan harus disusun berdasarkan hasil survey dan observasi yang telah dilaksanakan oleh Fasilitator.

3. Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana. Terkait dengan kelembagaan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanita (2017) hasil kinerja organisasi yang optimal dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah pengaruh kepemimpinan sebuah organisasi, budaya organisasi yaitu norma atau nilai yang dianut dalam suatu organisasi serta lingkungan kerja suatu organisasi. Ketika organisasi dalam Destana memiliki kinerja yang bagus, maka upaya penanggulangan bencana akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan melalui aspek kelembagaan adalah peningkatan kualitas kepemimpinan, membentuk budaya organisasi yang baik serta membuat lingkungan organisasi yang mendukung kinerja organisasi Destana. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Syarief (2017) menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam suatu organisasi mempengaruhi komitmen organisasi.



4. Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan). Kaitannya dengan keberjalanan program dengan pendanaan yang ada di Destana, program Destana Tlogopayung kurang berjalan karena kurangnya dana. Pendanaan, selain menghambat keberjalanan program juga akan mempengaruhi motivasi dan produktifitas anggota Destana seperti menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Indriyani (2014) gaji dan tunjangan kesejahteraan mempengaruhi produktifitas kinerja seseorang.
5. Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Dalam meningkatkan pengembangan kapasitas yang masih kurang, beberapa hal dapat dilakukan seperti pada penelitian Oktari (2019) yaitu melibatkan *multistakeholder* dalam mendukung terwujudnya Desa Tangguh Bencana contohnya pelibatan Dinas Pariwisata, PMI, Media dan Dunia Usaha. *Multistakeholder* akan membantu pelaksanaan penanggulangan bencana. Bantuan dapat berupa bantuan dana dan bantuan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tangggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kelurahan Tangguh Bencana, kriteria dalam penilaian Kelurahan Tangguh Bencana adalah dengan mengacu pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo yaitu mengandung aspek tata kelola, pengkajian risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan; dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Karena akan tidak mudah bagi desa/kelurahan untuk langsung mencapai kondisi ideal yang mengandung semua aspek tersebut, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian atas beberapa indikator yang tercantum dalam kuesioner. Dimana kuesioner tersebut terdiri atas pertanyaan- pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek- aspek ketangguhan dan isu- isu terkait kebencanaan lainnya. Kuesioner ini juga dapat mengukur tingkat ketangguhan sebuah desa/ kelurahan dalam menghadapi suatu bencana. Kategori pencapaian suatu desa dapat di bagi dalam 3 pertanyaan yaitu:

1. Pertanyaan pertama: mengidentifikasi apakah telah ada upaya atau prakarsa- prakarsa awal untuk mencapai indikator pada nomor yang bersangkutan.
2. Pertanyaan kedua: mengidentifikasi apakah indikator nomor bersangkutan telah tercapai, tetapi belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.
3. Pertanyaan ketiga: mengidentifikasi apakah pencapaian indikator pada nomor tersebut telah diikuti dengan kinerja yang memuaskan dan jelas-jelas membawa perubahan yang berarti dalam pengurangan risiko bencana.

Adapun kategori dari Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana berdasar indikator yang dicapainya adalah sebagai berikut:

#### 1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama

Tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam program ini. Tingkat ini dicirikan dengan:

- 1) Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan
- 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes
- 3) Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.
- 4) Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
- 5) Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan
- 6) Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

#### 2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya

Tingkat ini adalah tingkat menengah yang dicirikan dengan:

- 1) Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan.

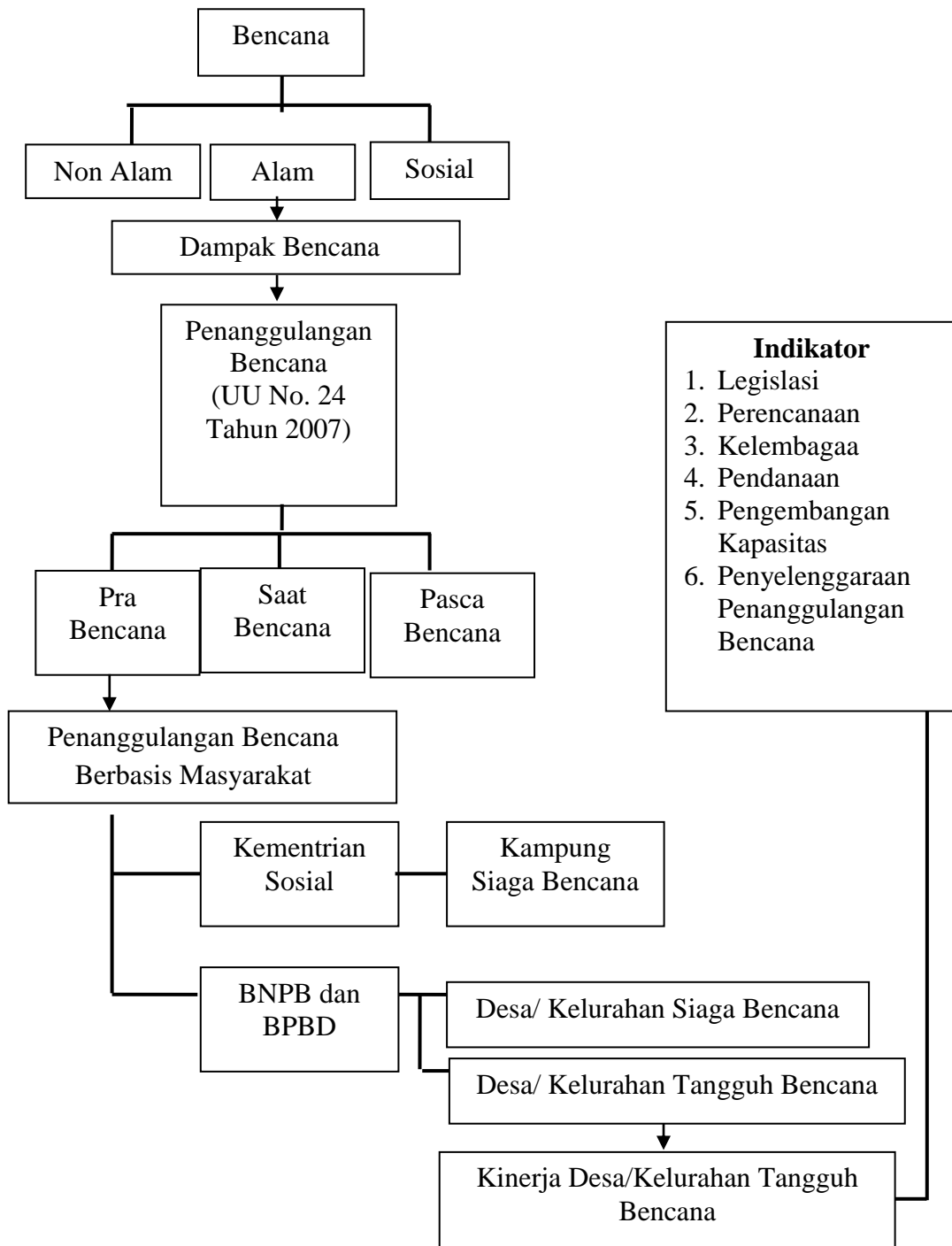
- 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa
  - 3) Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif
  - 4) Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif
  - 5) Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji
  - 6) Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis
3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama

Tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan:

- 1) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan
- 2) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB
- 3) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat
- 4) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan

- 5) Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan
- 6) Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

## 2.2 KERANGKA TEORI

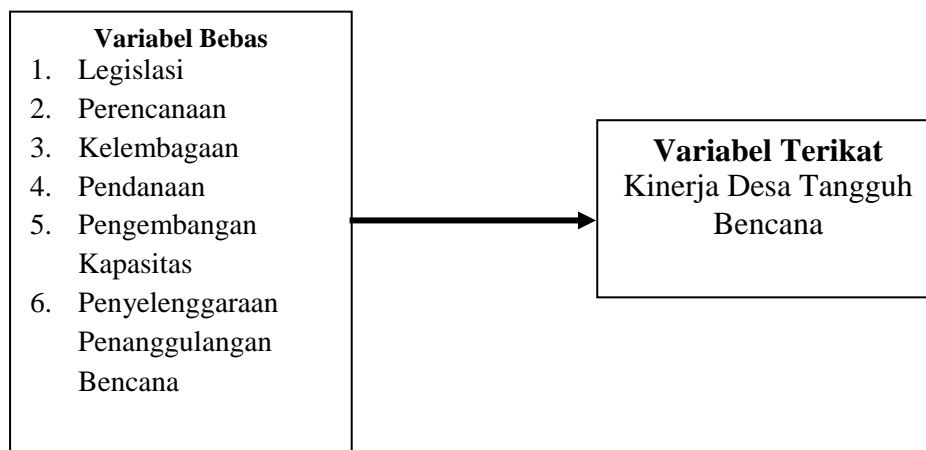


Gambar 2.1 Kerangka Teori

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 KERANGKA KONSEP**



**Gambar 3. 1 Kerangka Konsep**

#### **3.2 VARIABEL PENELITIAN**

##### **3.2.1 Variabel Bebas**

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komponen kinerja Desa Tangguh Bencana yaitu Legislasi, Perencanaan, Kelembagaan, Pendanaan, Pengembangan Kapasitas, Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana.

##### **3.2.2 Variabel Terikat**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

### 3.3 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan perbandingan variabel yang sama untuk dua sampel yang berbeda.

### 3.4 DEFINISI OPERASIONAL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
1	Kinerja	Tingkat pencapaian dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana berdasar indikator yang telah di tentukan.	Kuesioner	1. Destana Utama 2. Destana Madya 3. Destana Pratama	Ordinal
2	Legislasi	penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa	Kuesioner	1. Adanya upaya awal 2. Tersusunnya kebijakan 3. Adanya kebijakan yang dilegalkan	Ordinal
3	Perencanaan	penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan	Kuesioner	1. Adanya upaya awal 2. Tersusunnya dokumen perencanaan 3. Adanya dokumen perencanaan yang terpadu dalam rencana pembangunan desa. 4. Adanya dokumen	Ordinal



No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
		risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)		hasil analisis risiko	
4	Kelembagaan	Pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana	Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya upaya awal</li> <li>2. Forum FPRB sudah mulai berfungsi</li> <li>3. Forum FPRB berfungsi aktif dengan program yang diimplementasikan</li> <li>4. Adanya upaya membentuk tim relawan</li> <li>5. Adanya tim relawan yang terbentuk</li> <li>6. Tim relawan telah rutin melakukan kegiatan terprogram</li> <li>7. Adanya rencana kerjasama dengan pihak lain</li> <li>8. Adanya perjanjian kerjasama</li> <li>9. Adanya kegiatan</li> </ol>	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
5	Pendanaan	rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)	Kuesioner	<p>yang dilaksanakan dengan kerjasama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada upaya untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana yang akan digunakan untuk tanggap darurat,</li> <li>2. Sudah ada dana khusus yang dikumpulkan untuk tanggap darurat,</li> <li>3. Sudah ada pengelolaan dana dan mekanisme penggunaan dana khusus untuk tanggap darurat,</li> <li>4. Adanya upaya untuk pengalokasian dana desa untuk kegiatan pengurangan risiko bencana,</li> <li>5. Sudah ada alokasi dana desa untuk</li> </ol>	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
6	Pengembangan Kapasitas	pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana	Kuesioner	<p>kegiatan pengurangan risiko bencana,</p> <p>6. Sudah ada mekanisme dan pengelolaan dana anggaran pengurangan risiko bencana,</p> <p>1. Adanya upaya pemerintah desa untuk melaksanakan/ mengikuti pelatihan kebencanaan bagi aparatnya serta menyediakan perlengkapan dan personil penanggulangan bencana.</p> <p>2. Adanya personil terlatih dan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan kebencanaan</p> <p>3. Adanya mekanisme pemeliharaan</p>	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
				n, pemakaian dan pengembang an personil terlatih serta peralatan kebencanaan	
				4. Adanya upaya awal untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada tim relawan	
				5. Adanya pelatihan yang diberikan kepada tim relawan	
				6. Adanya praktik evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh tim relawan.	
				7. Adanya upaya memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam bentuk	

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
				<p>penyuluhan dan penyebaran informasi kepada warga desa terkait kebencanaan</p> <p>8. Adanya pelatihan kepada masyarakat terkait risiko bencana, penyelamatan darurat dan upaya pengurangan risiko bencana.</p> <p>9. Adanya praktik simulasi rutin untuk evakuasi dan penyelamatan darurat</p> <p>10. Adanya upaya untuk melibatkan warga desa dalam tim relawan</p> <p>11. Ada 30 warga yang menjadi anggota tim relawan dan terlibat aktif dalam kegiatan</p> <p>12. Adanya kelompok</p>	

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
				masyarakat yang melibatkan diri dalam kegiatan kebencanaan	
				13. Adanya upaya untuk melibatkan perempuan dalam tim relawan	
				14. Ada 15 orang perempuan yang menjadi tim relawan	
				15. Ada kelompok perempuan yang melibatkan diri dalam kegiatan kebencanaan	
7	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik	Kuesioner	1. Adanya upaya pemetaan dan analisis ancaman, kerentanan, kapasitas desa untuk melihat risiko di desa 2. Adanya dokumen hasil analisis risiko yang dibangun	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
		maupun non-struktural.	non-	<p>berdasar keterlibatan seluruh masyarakat.</p> <p>3. Adanya kegiatan yang dilaksanakan berdasar hasil analisis risiko</p> <p>4. Adanya rencana untuk membuat peta dan jalur evakuasi dan menyediakan tempat pengungsian</p> <p>5. Adanya peta dan jalur evakuasi dan dilengkapi dengan perlengkapan dasar P3K</p> <p>6. Adanya praktik simulasi evakuasi dan penyelamatan diri bersama warga</p> <p>7. Adanya upaya membangun sistem peringatan</p>	

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
				dini berbasis masyarakat.	
				8. Adanya sistem peringatan dini yang dilengkapi dengan data informasi, peralatan, personil yang memadai serta mekanisme penyampaian yang jelas cepat akurat kepada warga.	
				9. Adanya praktik simulasi pelaksanaan sistem peringatan dini bersama masyarakat	
				10. Adanya rencana untuk melakukan pembangunan fisik untuk mengurangi risiko bencana.	
				11. Sudah ada pembangunan fisik yang dilaksanakan untuk mengurangi	



No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
				risiko bencana	
				12. Adanya mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan pembangunan fisik untuk menjamin kelestariannya serta upaya untuk menyebarkan	
				13. Adanya rencana pembangunan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat	
				14. Adanya kegiatan pengembangan ekonomi	
				15. adanya mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pengembangan ekonomi	
				16. Adanya rencana untuk memberikan perlindungan kesehatan dan santunan	

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
				social kepada kelompok rentan	
				18. Adanya pengelola, mekanisme, dan prosedur pengelolaan perlindungan kesehatan dan santunan social kepada kelompok rentan	
				19. Adanya rencana pengelolaan sumber daya alam untuk upaya pengurangan risiko	
				20. Adanya kegiatan pengelolaan sumber daya alam sebagai upaya pengurangan risiko bencana	
				21. Adanya mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam	
				22. Adanya	

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Data
				upaya perlindungan asset produktif untuk masyarakat dari dampak bencana	
				23. Adanya kegiatan perlindungan asset produktif masyarakat	
				24. Adanya pengelola dan mekanisme yang jelas untuk menjalankan dan memelihara perlindungan asset produktif masyarakat	

### 3.5 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah dua Desa Tangguh BencanaTanah Longsor di Kabupaten Kendal yaitu Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan dan Desa Cening Kecamatan Singorojo.

### **3.6 SUMBER DATA**

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil pengisian kuesioner dari responden terkait kinerja yang dilakukan oleh organisasi Desa Tangguh Bencana di masing- masing desa.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan permasalahan penelitian, maupun dokumen-dokumen resmi dari Desatana maupun BPBD Kabupaten Kendal.

### **3.7 INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **3.7.1 Instrumen Penelitian**

##### **1. Alat Tulis**

Alat tulis digunakan untuk mencatat data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Alat tulis memudahkan peneliti dalam melaporkan hasil penelitian yang dilakukan.

##### **2. Kuesioner**

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, sudah matang, dan saat dilakukan penelitian responden hanya menjawab atau memberikan tanda tertentu (Notoatmodjo, 2010). Kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai kinerja Destana di kedua Desa.

##### **3. Kamera**

Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian dan untuk mendokumentasikan kegiatan observasi yang dilakukan.

### **3.7.2 Teknik Pengambilan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden menggunakan kuesioner terstruktur sebagai panduan.

#### **2. Observasi**

Pengamatan (observasi) adalah suatu prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi kegiatan melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016).

#### **3. Dokumentasi**

Metode ini digunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat *digital camera*.

## **3.8 PROSEDUR PENELITIAN**

### **3.8.1 Tahap Pra Penelitian**

Tahap pra penelitian adalah kegiatan yang dilakukan sebelum penelitian.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan studi pustaka dan mencari data pendukung dari beberapa sumber untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada.
2. Menentukan besaran populasi dan sampel yang akan diteliti.
3. Menyiapkan lembar kuesioner dan pedoman wawancara.
4. Melakukan koordinasi dan proses perijinan penelitian.

### **3.8.2 Tahap Penelitian**

Tahap penelitian adalah kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan wawancara terhadap sampel yang telah ditentukan.
2. Melakukan observasi secara langsung.
3. Mencatat hasil wawancara dan observasi.

### **3.8.3 Tahap Pasca Penelitian**

Tahap pasca penelitian adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengambilan data di lapangan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Pencatatan hasil penelitian
2. Pengolahan dan analisis data

## **3.9 TEKNIK ANALISIS DATA**

### **1. Editing**

Sebelum diolah, data hasil penelitian perlu diperiksa terlebih dahulu. Editing pada penelitian ini adalah melakukan koreksi hasil wawancara dengan responden untuk mengetahui apakah kuesioner telah diisi dengan benar oleh responden.

### **2. Coding**

Data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk kalimat yang pendek atau panjang kemudian diberi kode pada jawaban tersebut. Pemberian kode pada jawaban responden untuk mempermudah dalam menganalisis data.

### **3. Entry Data**

Data yang telah diberikan kode kemudian dimasukkan ke dalam program computer untuk diolah dengan bantuan computer.

#### 4. Tabulating

Tabulating dalam penelitian ini dengan mengelompokkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembacaan hasil penelitian.

##### **3.9.1 Penentuan Kategori Pencapaian Aspek Kinerja**

Penentuan kategori pada tiap aspek kinerja yaitu legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan cara menghitung skor indikator yang sudah dicapai untuk setiap Desa Tangguh Bencana untuk selanjutnya dibandingkan dan di kategorikan. Untuk kategori desa tangguh bencana ini menggunakan penilaian kinerja menurut Abdullah (2014) yaitu Deskriptor Level Kinerja (DLK) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: Baik (68%-100%), Cukup ( 34%-67%), dan Kurang (0-33%).

##### **3.9.2 Penentuan Kategori Berdasarkan Hasil Kuesioner**

Setelah mengisi kuesioner yang telah ada, maka dapat kita ketahui hasil skor yang diperoleh setiap kelurahan dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)
- 2) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)
- 3) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35)

Dengan kategori tersebut dapat kita ketahui tentang gambaran pencapaian kinerja masing- masing Desa Tangguh BencanaTanah Longsor di Kabupaten Kendal.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 SIMPULAN**

Penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Kinerja Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor di Desa Tlogopayung dan Desa Cening Kabupaten Kendal Tahun 2019)” terdapat 6 aspek yang digunakan dalam penilaian kinerja yaitu legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pada aspek legislasi, terdapat 3 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung dan Cening sama- sama 100% dengan kategori baik.
2. Pada aspek perencanaan, terdapat 4 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung 100% dengan kategori baik dan Destana Cening 75% dengan kategori baik.
3. Pada aspek kelembagaan, terdapat 9 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung 33% dengan kategori kurang dan Destaa Cening 78% dengan kategori baik.
4. Pada aspek pendanaan, terdapat 6 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung dan cening sama- sama 33% dengan kategori kurang.
5. Pada aspek pengembangan kapasitas, terdapat 15 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung 60% dengan kategori cukup dan Destana Cening 67% dengan kategori cukup.



6. Pada aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat 24 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung 25% dengan kategori kurang dan Destana Cening 50% dengan kategori cukup.

## **6.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait kinerja Destana di Desa Tlogopayung dan Desa Cening, saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

### **6.1.1 Bagi Desa Tangguh Bencana Tlogopayung**

#### **6.1.1.1 Untuk Kepala Desa Tlogopayung**

1. Perlu adanya upaya pengalokasian dana desa untuk kegiatan Desa Tangguh Bencana agar kegiatan kebencanaan dapat berjalan secara optimal.

#### **6.1.1.2 Untuk Ketua Desa Tangguh Bencana**

1. Mencari sumber dana yang memungkinkan yang dapat digunakan untuk kegiatan destana. Misalnya dengan iuran rutin seperti yang dilakukan oleh destana Cening. Iuran rutin bisa dilaksanakan secara sukarela mingguan atau iuran rutin bulanan. Selain itu, pendanaan dapat dilakukan dengan cara melakukan usaha mandiri destana agar mendapatkan keuntungan untuk kegiatan kebencanaan. Contoh usaha mandiri bisa melakukan kegiatan bank sampah atau menjual hasil karya anggota destana untuk pengembangan dana destana.
2. Berperan aktif dalam melakukan kerjasama dengan organisasi lain untuk keberlangsungan kegiatan dan menghemat pendanaan. Misalnya melakukan

kerjasama penanaman pohon dengan kelompok tani dengan meminta bantuan bibit pohon kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menghemat anggaran.

3. Melakukan berbagai macam kegiatan pengembangan kapasitas seperti pelatihan kebencanaan untuk anggota destana dan tim relawan, serta sosialisasi kebencanaan untuk masyarakat desa.
4. Melakukan penanggulangan bencana melalui kerjasama dengan organisasi lain dan melalui pendanaan yang sudah dipersiapkan secara mandiri. Misalnya melakukan penanaman pohon, pembuatan saluran air dan pemantauan tanah yang mungkin terjadi longsor melalui kerjasama dengan kelompok tani, banser, atau PKK.

#### 6.1.1.3 Untuk Anggota Desa Tangguh Bencana

1. Meningkatkan semangat dan upaya dalam melaksanakan kegiatan kebencanaan seperti melaksanakan kegiatan pemantauan wilayah, rapat rutin dan membuat bangunan fisik untuk pencegahan bencana meski belum ada pendanaan seperti yang diharapkan.

#### 6.1.2 Bagi Desa Tangguh Bencana Cening

##### 6.1.1.1 Untuk Kepala Desa Cening

1. Perlu adanya upaya pengalokasian dana desa untuk kegiatan Desa Tangguh Bencana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kebencanaan.

##### 6.1.1.2 Untuk Ketua Desa Tangguh Bencana Cening

1. Membuat usaha mandiri untuk meningkatkan pendanaan kegiatan kebencanaan. Seperti membangun usaha bank sampah atau penjualan karya anggota destana.

2. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan destana Tlogopayung untuk meningkatkan kinerja destana Tlogopayung.

#### 6.1.1.2 Untuk Sekretaris dan Bendahara Desa Tangguh Bencana

1. Melakukan pencatatan segala jenis kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi dan peningkatan kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Adiyoso, Wignyo. (2018). *Manajemen Bencana Pengantar dan Isu- Isu Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Alimohammadlou, Yashar, dkk. 2013. Landslide process and imoacts: a proposed classification method. *Catena Journal*. Nomor 104 Tahun 2013.
- Ariyani, D. 2016. Kajian Pelaksanaan Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Gampong Payatieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*. 3(4): 127-133
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2011). Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Paca Bencana. BNPB:Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Siaga Bencana. BNPB:Jakarta
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. BNPB:Jakarta
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016). *Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. BNPB: Jakarta
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2019). Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir. BNPB: Jakarta
- Bhardwaj, Alok, dkk. (2019). Characteristics of rain- induced landslides in the Indian Himalaya: A case study of the Mandakini Catchment during the 2013 flood. *Geomorphology Journal*. 330(19): 100-115.
- Budiono, Irwan dkk. (2017). Pedoman Penyusunan Skripsi. Semarang: IKM Unnes

- Data Bencana Indonesia. Diambil 15 Januari 2019, dari Web Site Data Bencana Indonesia: <http://dibi.bnpb.go.id/>
- Daud, Ramli, dkk. (2014). Penerapan Pelatihan Siaga Bencana dalam Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Komunitas SMA Negeri 5 Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*. Universitas Syiah Kuala. Vol I, No 1.
- Drazba, Marina C, dkk. (2018). Landslide Hazard in Fiji, managing the risk and not the disaster, a literature review. *Engineering Journal*. Nomor 212 Tahun2018.
- Habibullah. 2013. Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. *Jurnal Informasi*, 18(2):133–150.
- Hermon, Dedi. (2012). *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Banjir, Longsor, Degradasi Lahan, Ekologi, Kekeringan, dan Puting Beliung*. Padang: UNP Press.
- IDEP. (2007). *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Bali: Yayasan IDEP
- Indriyani, A. 2014. Analisis Pengaruh Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Operation Department PT. Export Leaf Indonesia. *Jurnal Paradigma*. 12(1): 41-56
- Iranti, Deski. (2017). Implementasi Program Kesiapsiagaan Berbasis Masyarakat diPalang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: UniversitasNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Irawan David & Subowo, Ari. (2016). Peran Kelurahan Siaga Bencana Guna Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Muktoharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*. Universitas Diponegoro.
- Martens K, dkk. 2018. Disaster Risk Reduction Among Household Exposed to Landslide Hazard: A Crucial Role for Self- Efficace. *Land Use Policy Journal*. Vol 75(4): 114-128
- Mohammad, Nezar Ely, dkk. (2018). Kapasitas Masyarakat Terhadap Ancaman Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tahun 2017. *Jurnal Edu Geography* 6 (1).
- Moehariono. 2011. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia.

- Notoadmodjo, Soekidjo. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oktari, Rina Suryani. (2019). Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2541- 5883 (197-199)
- Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pfurtscheller, Clemens, dkk. (2019) The Felbertaurn Landslide of 2013 in Austria: Impact on Transport Networks, Regional Economy and Policy Decisions. *Case Studies on Transport Policy Journal*. S2213-624X(18)30081-6
- Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara
- Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saroji, dkk.(2016). Kajian Empiris Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Terhadap Ketangguhan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Bencana Tsunami: Studi Kasus di Dua Gampong Pesisir Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*. 3(4): 142-148
- Setyoningsih, Ika Ayu. (2018). Peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (Fprb) Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat di Desa Tangguh Bencana (Destana) Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susanti, Rina, dkk. (2014). Hubungan Kebijakan, Sarana dan Prasarana dengan Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah Siaga Bencana Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*.1(1): 42-49
- Sutrisno,Edy . 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Kencana
- Syarief, A. 2017. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi

- Terhadap Komitmen Organisasi dan Perilaku Kewargaan Organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 8(3): 173–188.
- Tersiana, Andra. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up
- Yanita, Poni. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja pada Pegawai Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*. 2(2): 150-156
- Zahrah, Zahirah. (2017). Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*. Universitas Diponegoro.